

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah Tri Wahyudi, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta .
- Abdurrahman, 1983, *Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Cet.2, Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bernhard Limbong, 2011, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Regulasi, Kompensasi Penegakan Hukum*, Pustaka Margaretha, Jakarta.
- Boedi Harsono 2008, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Eddy Pranjoto, 2006, *Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional*, Utomo, Bandung
- Harahap Yahya, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Cet. 3, Djambatan, Jakarta.
- Mardani, 2010, *Hukum Acara Perdata Peradilan agama dan mahkamah syari'ah*, sinar grafika.
- Maria SW Sumardjono. 2008. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Edisi Revisi, Kompas, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bakti, Bandung
- Sarmin Syukur, 2018, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Jaudar Press, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusomo, 2006 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Surdjowo Marsoem, Wahyono Adi, Pieter G. Manoppo, 2015, *Pedoman lengkap Ganti Untung Pengadaan Tanah*, Rene Book, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP).

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

C. Jurnal

Cici Fathona dan Fauzia Lubis, 2024, Analisis Strategi Hukum Dalam Mempercepat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Perdata, Jurnal Hukum Vol. 5 No 2

Donny Markas Sahputra G. Munthe, Selamat Lumban Gaol, dan Sudarto, *Kepemilikan Tanah Hak Milik Bekas Barat (Eigendom Verponding) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, BLAM Law Review Vol. 4, No. 2 (2024): 159

Subekti, R. 2016. Kebijakan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Yustisia, 5(2)

Sagung Tri Buana Marwanto, *Pengaturan Hak Penguasaan Tanah Hak Milik Perorangan Oleh Negara*, Vol. 5, No. 4 (2017), Hlm. 9

Tomi Firdaus, Tesis : *Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Lubuk Kilangan – Bungus Teluk Kabung Kota Padang* (Universitas Andalas, 2017)

Victor D. D. dkk, 2024, Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata, Jurnal Lex Administratum Vol. 12 No. 4

Yulies Tiena Masriani, *Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak*, USM Law Review Vol. 5, No. 2 (2022):540

D. INTERNET

<https://www.kompasiana.com/sutomopaguci/55101eee813311a839bc60bc/pr-oyek-tmmd-bungus-diduga-langgar-ham>, diakses pada tanggal 8 Juni 2025, Pukul 15.56 WIB.

<https://www.inilah.com/warga-bungus-tuntut-ganti-rugi-lahan>, diakses pada tanggal 5 Juli 2025, Pukul 12.00 WIB

<https://sumbar.antaranews.com/berita/27640/pemkot-padang-tmmd-bungus-bermanfaat-bagi-masyarakat>, diakses pada 14 Juli, Pukul 14.00 wib

